

SKRIPSI

**PENGARUH PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TERHADAP BIAYA PENDIDIKAN YANG DIKELUARKAN
ORANG TUA SISWA
PADA SMPN DI KECAMATAN BATIPUH SELATAN**



OLEH

FITRI EVALINA

42969/2003

Pend. Ekonomi Koperasi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2007

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PENGARUH PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) TERHADAP BIAYA PENDIDIKAN
YANG DIKELUARKAN ORANG TUA SISWA PADA
SMPN DI KECAMATAN BATIPUH SELATAN**

Nama : Fitri Evalina
BP/NIM : 2003/42969
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Agus Irianto
Nip. 130 879 791

Drs. H. Zulfahmi, Dip. IT
Nip. 131 875 521

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Biaya
Pendidikan yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa
Pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan**

Nama : Fitri Evalina
BP/NIM : 2003/42969
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2008

Tim Penguji,

No	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1	Ketua	Prof. Dr. H. Agus Irianto	-----
2	Sekretaris	Drs. H. Zulfahmi, Dip. IT	-----
3	Anggota		-----
4	Anggota		-----

ABSTRAK

Fitri Evalina 2003/42969 Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa Pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan. Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Agus Irianto dan Bapak Drs. Zulfahmi, Dipt. I.T

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan. Penelitian ini dilakukan pada SMPN 3 dan SMPN 4 di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap penurunan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif asosiatif, dimana variabel X adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan variabel Y adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 3 dan SMPN 4 Kecamatan Batipuh Selatan. Jumlah populasi adalah 256 orang, Sedangkan sampel diambil dengan menggunakan rumus Frank Linck dan *Stratified Proporsional Random Sampling*, sehingga jumlah sampel adalah 70 orang. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang berguna untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Data dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif, uji prasyarat dan inferensial yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, analisis regresi linier sederhana dan uji t.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh signifikan terhadap penurunan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Sumbangan program BOS terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa adalah 23,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat program dana BOS maka semakin meningkat pula penurunan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

Diharapkan kepada orang tua siswa agar dapat mengalokasikan kelebihan dana akibat penurunan biaya pendidikan yang ditanggung setelah adanya program BOS pada bidang yang lebih bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan anak-anaknya dan meningkatkan motivasi dalam menyekolahkan anak-anaknya sehingga program wajib belajar sembilan tahun dapat tercapai.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Biaya Pendidikan yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa Pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan”. Adapun tujuan akhir dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Agus Irianto selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfahmi, Dip. IT selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini. Hanya Allah SWT yang akan membalasnya. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Agus Irianto, Bapak Drs. H. Zulfahmi, Dip. IT selaku pembimbing dan Bapak Drs. Ali Anis, Msi, Bapak Drs. Syamwil, Mpd dan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa MS selaku Dewan Penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan pada penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
3. Ketua dan Sekretaris Progam Studi, Staf Pengajar beserta karyawan/wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Zulhadi S. Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batipuh Selatan dan Bapak Sirajul Fuad, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Batipuh Selatan yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.
5. Siswa dan orang tua siswa SMPN 3 Batipuh Selatan dan SMPN 4 Batipuh Selatan yang telah membantu dalam pengisian angket penelitian.
6. Bapak dan Ibu Karyawan/wati Tata Usaha SMPN 3 Batipuh Selatan dan SMPN 4 Batipuh Selatan yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat, teman dan rekan-rekan seperjuangan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi khususnya keahlian Ekonomi Koperasi yang selalu ada dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak terutama yang bersifat membangun guna kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Biaya Pendidikan.....	9
2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	13
a. Tujuan BOS.....	13
b. Sasaran Program dan Besar Bantuan BOS	14

c. Landasan Hukum.....	15
d. Penggunaan Dana BOS.....	16
3. <i>Stakeholders</i> Dalam Penyelenggaraan Pendidikan	19
B. Penelitian Yang Relevan	23
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel	27
D. Variabel dan Data.....	30
E. Prosedur Penelitian.....	31
F. Definisi Operasional.....	31
G. Instrumen Penelitian.....	33
H. Teknik Analisis Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	41
1. Gambaran Umum SMPN 3 Kec. Batipuh Selatan	41
2. Gambaran Umum SMPN 4 Kec. Batipuh Selatan	42
B. Hasil Penelitian	43
1. Deskriptif Variabel	43
2. Analisis Inferensial.....	54
C. Pembahasan	57
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Data Siswa SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan.....	27
Tabel 2 Data Tingkat Ekonomi Siswa SMPN di Kec. Batipuh Selatan.....	27
Tabel 3 Teknik Pengambilan Sampel dengan Stratified Proporsional Random Sampling	29
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pada Uji Instrumen	34
Tabel 5 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Pada Uji Coba Instrumen	35
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas	37
Tabel 7 Hasil Uji Homogenitas.....	38
Tabel 8 Data Kondisi Ruang SMPN 3 Kec. Batipuh Selatan.....	41
Tabel 9 Jumlah Dana BOS yang Diterima Sekolah	43
Tabel 10 Biaya Pendaftaran Siswa Baru Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS.....	44
Tabel 11 Biaya Pembelian Buku Teks Pelajaran dan Buku Referensi Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS	45
Tabel 12 Biaya Untuk Kegiatan Praktikum Tiap Semester Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS.....	46
Tabel 13 Biaya Untuk Program Remedial Tiap Semester.....	47
Tabel 14 Biaya Untuk Kegiatan Ekstrakurikuler (Olah Raga, Kesenian, Karya Ilmiah dan Pramuka) Tiap Semester Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS	47

Tabel 15	Biaya Untuk Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS	48
Tabel 16	Biaya Untuk Dana Pembangunan (Perawatan Sekolah, Pembangunan Gedung Baru, Pengecatan, Perbaikan Atap dan Jendela) per Semester Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS...	49
Tabel 17	Biaya Untuk Biaya Transportasi Anak Per Bulan Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS.....	50
Tabel 18	Biaya Untuk Iuran Sekolah (SPP) Tiap Semester Sebelum dan Setelah Adanya Dana BOS.....	51
Tabel 19	Biaya Untuk Pembelian Buku dan Alat-alat Tulis Tiap Tahun.....	52
Tabel 20	Biaya Untuk Pembelian Seragam Sekolah, Tas dan Sepatu Tiap Tahun	53
Tabel 21	Biaya Untuk Uang Saku Anak per Hari.....	53
Tabel 22	Biaya Untuk Pembayaran Kursus Tiap Semester.....	54
Tabel 23	Biaya Untuk Kegiatan Karya Wisata Tiap Tahun.....	54
Tabel 24	Biaya Untuk Dana Kesehatan Tiap Tahun.....	55
Tabel 25	Uji Linieritas.....	56
Tabel 26	Nilai Pendugaan Koefisien Regresi	56

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Kerangka Berfikir Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Kisi-kisi Kuesioner Penelitian	64
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	66
Lampiran 3 Distribusi Jawaban Uji Coba Variabel Bantuan Operasional Sekolah/BOS (X)	74
Lampiran 4 Distribusi Jawaban Uji Coba Variabel Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa (Y)	76
Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	77
Lampiran 6 Uji Validitas dan Reliabilitas Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa (Y)	78
Lampiran 7 Tabulasi Data Penelitian.....	79
Lampiran 8 Tabel Frekuensi Variabel X (Bantuan Operasional Sekolah/BOS)	83
Lampiran 9 Tabel Frekuensi Variabel Y (Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa).....	89
Lampiran 10 Uji Normalitas dan Homogenitas.....	92
Lampiran 11 Uji Linieritas	93
Lampiran 12 Regresi.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pemberian akses yang lebih besar ditujukan kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan. Anak usia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah masih sekitar 693.700 orang (1,7 persen). Sementara itu yang tidak bersekolah lagi baik karena putus sekolah maupun karena tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6,7 persen dari total penduduk 7-15 tahun (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Secara kumulatif jumlah siswa putus sekolah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mencapai 1,39 juta untuk jenjang SD/MI, 535.700 untuk jenjang SMP/MTs dan 352.600 untuk jenjang SMA/SMK/MA. Disparitas partisipasi sekolah juga masih cukup tinggi antar kelompok masyarakat. Salah satu kesenjangan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai gambaran, pada saat rata-rata Angka Partisipasi Kasar

(APK) jenjang SMP/MTs sebesar 81,08 persen, sementara APK kelompok terkaya telah mencapai 99,51 persen, sementara APK kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sekaligus untuk mencapai sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang antara lain diukur dengan tercapainya APK jenjang SMP/MTs sebesar 95 persen pada tahun 2008, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti *Education For All (EFA)* dan *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, laki-laki dan perempuan dimanapun, minimal sampai jenjang pendidikan dasar.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Biaya pendidikan selama ini lebih banyak ditanggung oleh masyarakat daripada pemerintah, seperti: biaya pembelian buku-buku pelajaran, alat tulis sekolah, pakaian, perlengkapan sekolah, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, karya wisata, uang saku, kursus dan iuran sekolah (SPP). Porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa mencapai 53,74 persen - 73,87 persen dari biaya pendidikan total (BPT). Sementara porsi biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat (selain orangtua siswa) sebesar 26,13 persen-46,26 persen dari BPT (Anonymous, 2004).

Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan. Pemerintah memberikan beasiswa secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 juta siswa SMP/MTs, dan 500.000 siswa SMA/SMK/MA. Sejak tahun 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, pemerintah tetap melanjutkan pemberian beasiswa tersebut melalui PKPS-BBM.

Kenaikan harga BBM mulai tanggal 1 Maret 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM bidang pendidikan perlu dilanjutkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2005, dan sehubungan dengan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional

Sekolah (BOS). Berdasarkan SK Menteri Nomor 160/MPN/DS/2005 melalui Menteri Pendidikan Nasional tentang Biaya Operasional sekolah menjelaskan, bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMPLB negeri atau swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah agama non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun atau yang disebut dengan sekolah dimulai pada awal tahun pelajaran 2005/2006 bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan 2005 dijelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Buku Panduan BOS tahun 2006 dan 2007 dinyatakan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

SMPN 3 dan SMPN 4 di Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar termasuk sekolah yang menerima program dana BOS. Berdasarkan data dari bendaharawan sekolah, SMPN 3 menerima dana BOS untuk periode Juli–Desember 2007 sebesar Rp 22.032.000 dengan jumlah siswa 136 orang. Sedangkan SMPN 4 menerima dana BOS untuk periode Juli-Desember sebesar

Rp 19.440.000 dengan jumlah siswa 120 orang. Dengan adanya program BOS ini pihak sekolah membebaskan segala bentuk pungutan/iuran/sumbangan terhadap siswa. Hal ini terkait dengan ketentuan yang mengikat sekolah penerima program dana BOS, dimana pada SMPN 3 dan SMPN 4 ini terdapat siswa miskin sehingga sekolah membebaskan segala jenis pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut.

Melalui BOS peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru yang tidak dibiayai pemerintah pusat dan/atau daerah.

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa, dan bahkan agar siswa miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Hasil penelitian Hastuti melalui SMERU pada Februari dan Maret 2006 mengenai konsep dan penyelenggaraan program memperlihatkan bahwa sebagian besar murid SD dan SMP menerima manfaat dari program BOS dan dalam pelaksanaannya program BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Sebagian besar sekolah penerima menggunakan dana BOS untuk kegiatan operasional yang menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dana BOS dinikmati oleh semua siswa, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga tidak mampu. Sebagian besar sekolah juga memutuskan untuk

memberi perlakuan yang sama kepada semua siswa dalam pembebanan biaya-biaya sekolah yang masih ditarik dari siswa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menawarkan berbagai manfaat yang dapat mengurangi beban orang tua siswa sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan biaya pendidikan siswa. Beban yang penulis maksud di sini adalah berhubungan dengan tingkat biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Dengan demikian penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul: **Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Biaya Pendidikan Yang Dikeluarkan Orang Tua Siswa pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak program BOS terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar.
2. Bagaimana dampak program BOS terhadap pemerataan pendidikan dasar.
3. Bagaimana pengaruh program BOS terhadap akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
4. Bagaimana pengaruh program BOS terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penulis akan membahas mengenai pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan. Biaya pendidikan selama ini lebih banyak ditanggung oleh orang tua siswa dibanding pemerintah sehingga dengan adanya program BOS diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang paling relevan dengan latar belakang dan judul penelitian penulis adalah: “Sejauh mana pengaruh program BOS terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan”?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program BOS terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa pada SMPN di Kecamatan Batipuh Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program S1 pada program studi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pendidikan.
3. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan atau disebut juga Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, 2006:7). Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional.

BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan (Diklat) guru), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Guru

(KKG), dll). Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Berdasarkan tingkat pengeluarannya biaya pendidikan terbagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, dan uang saku (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Dikaitkan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya serta biaya untuk peningkatan mutu guru.

Sebagian besar biaya pendidikan di atas dibebankan kepada orang tua siswa yang terdiri dari berbagai tingkatan ekonomi. Ricardo (dalam Muslim, 2007:23) membagi tingkatan ekonomi keluarga menjadi tiga golongan yaitu golongan ekonomi kuat, golongan ekonomi sedang dan golongan ekonomi rendah. Porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa mencapai 53,74% sampai 73,87% dari Biaya Pendidikan Total (BPT). Sementara porsi biaya pendidikan yang ditanggung

pemerintah dan masyarakat (selain orang tua siswa) sebesar 26,13% sampai 46,26% dari BPT (Anonymous, 2007).

Pemerintah telah memberikan bantuan di bidang pendidikan untuk menjaga agar anak-anak dari keluarga miskin dapat tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Sejak Tahun Ajaran (TA) 1998/1999 hingga 2002/2003, pemerintah memberikan beasiswa bagi murid miskin dalam jumlah cukup besar melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan. Program ini dirancang untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi mulai 1997 yang mengancam keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan keluarga yang jatuh miskin akibat krisis tersebut.

Setelah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2001, pemerintah juga memberikan beasiswa serupa melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Program beasiswa dari JPS dialokasikan untuk mencakup sekitar 6% murid SD, 17% murid SMP, dan 9% murid SMA. Sedangkan BKM dialokasikan kepada sekitar 20% murid di tingkat SD, SMP, dan SMA. Berbeda dari cakupan alokasi tersebut, data Susenas yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga miskin yang anaknya mendapat beasiswa relatif kecil, yaitu kurang dari 15% (Hadiz, 2006).

Besarnya biaya pendidikan yang mestinya ditanggung pemerintah, misal: sebelum adanya program BOS pada tahun ajaran 2003/2004, antara lain:

- a. Pertama, biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang besarnya mencapai sekitar Rp 59,750 triliun per tahun. Rata-rata biaya satuan pendidikan (biaya pendidikan per siswa per tahun) di sekolah/madrasah negeri adalah sebagai berikut: SD Rp 1,864 juta, MI Rp 1,960 juta, SMP Rp 2,771 juta, MTs Rp 2,246 juta, SMA Rp 3,612 juta, MA Rp 2,673 juta, dan SMK Rp 4,737 juta. Dengan mengalikan jumlah siswa di masing-masing sekolah/madrasah, diperoleh angka Rp 70,317 triliun.
- b. Kedua, biaya pemberian beasiswa bagi anak usia pendidikan dasar dari keluarga miskin sekitar Rp 9,600 triliun per tahun.
- c. Ketiga, biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri yang besarnya adalah sekitar Rp 10,450 triliun per tahun.
- d. Keempat, biaya penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang ditanggung pemerintah diperkirakan Rp 1,300 triliun per tahun.
- e. Kelima, biaya manajemen pemerintah di bidang pendidikan yang besarnya adalah sekitar Rp 19,900 triliun per tahun. Biaya manajemen pendidikan ini adalah biaya untuk sarana dan prasarana serta operasional manajemen pendidikan dari tingkat pemerintah pusat sampai kecamatan (Anonymous, 2004).

2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS atau Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan yang ditujukan untuk membebaskan semua atau sebagian biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa (Medika, 2005:34). Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu jenis dari biaya pendidikan operasional. Dimana Bantuan Operasional Sekolah yang dimaksud dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil.

Bantuan Operasional Sekolah yang dimaksud dalam PKPS-BBM bidang pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

a. Tujuan BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

b. Sasaran Program dan Besar Bantuan BOS

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah adalah semua SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dan Salafiyah setara SD dan SMP baik negeri maupun swasta diseluruh Kabupaten/ Kota dan Propinsi di Indonesia dengan ketentuan bahwa sekolah tersebut mempunyai surat izin operasional atau kelembagaan dari Pemerintah Daerah atau Kantor Departemen Agama. Sementara itu Program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran BOS, karena sudah merupakan pendidikan dasar gratis yang dibiayai secara penuh oleh pemerintah, dan sekolah kaya, mapan dan mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dari dana BOS memiliki hak untuk tidak menerima BOS.

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis. Bagi sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik.
2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bagi sekolah yang masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS, sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.
- b. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

Besar biaya bantuan operasional yang diterima oleh sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/MI/SDLB/Salafiyah Rp. 117.500,-/siswa per semester atau sebesar 235.000,-/tahun.
2. SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Rp 162.250,-/siswa per semester atau sebesar 324.500,-/tahun.

c. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan PKPS-BBM bidang pendidikan tahun 2005 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

d. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber

penerimaan dalam RAPBS. Khusus untuk pesantren salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara penanggung jawab program dengan pengasuh pondok pesantren dan disetujui oleh Kasi PD PONTREN (Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren), kantor Departemen Agama kabupaten /kota. Bagi sekolah keagamaan non islam dalam penggunaan dana BOS kepala sekolah harus meminta persetujuan dari Kasi PEMBIMAS (Pembimbingan Masyarakat), Departemen Agama kabupaten/kota.

Menurut buku panduan BOS dan BOS buku 2006 dana bantuan Operasional Sekolah hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Operasional Sekolah, di antaranya :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru seperti biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dialokasikan di perpustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, teh, dan untuk kebutuhan sehari-hari sekolah.
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan sejenisnya.

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru, seperti pelatihan, KKG atau MGMP dan KKKS atau MKKS.
7. Pembiayaan perawatan sekolah, seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, dan perawatan lainnya.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa seperti, listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak di biyai pemerintah, tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS sepenuhnya ditanggung Pemerintah Daerah.
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
11. Khusus untuk pesantren Salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama dan membeli peralatan ibadah.
12. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS masih tersisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebel sekolah.

Sementara itu dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini tidak dapat digunakan untuk:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
4. Membangun gedung atau ruangan baru.
5. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanamkan saham.
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh atau mencukupi sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak atau guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

3. *Stakeholders* dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pada dasarnya keberadaan *stakeholders* sebagai mitra kerja lembaga pendidikan sangat mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan, karena dengan dilibatkannya *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan berarti tugas menyukseskan pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, orang tua, siswa dan para pengelola pendidikan itu sendiri.

Dalam *stakeholders society*, negara tidak lagi berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang bertujuan melestarikan kekuasaan negara, tetapi sebagai partner yang memfasilitasi proses pendidikan yang disepakati bersama, dimana dalam *stakeholders society* lembaga pendidikan merupakan pusat pengambilan keputusan, *stakeholders* yang dimaksud sebagai pemegang saham pendidikan disini adalah masyarakat lokal, orang tua, peserta didik, negara, dan pengelola profesional pendidikan.

Stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan terdiri dari:

1. Negara

Dalam *stakeholders* pendidikan negara bukanlah pemilik saham tunggal pendidikan, tetapi negara merupakan partner kerja yang memfasilitasi proses pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh *stakeholders*. Dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah berperan dalam pembinaan dan memfasilitasi keperluan pendidikan inklusi mulai dari sosialisasi pendidikan sampai pada pelayan pendidikan.

2. Pengelola Profesional Pendidikan

Para pengelola profesional yang dimaksud disini bukan hanya dinas pendidikan tapi termasuk didalamnya kepala sekolah dan guru.

a. Dinas Pendidikan

Di tingkat pusat Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional sebagai administrator dibantu oleh Sekretaris Jendral, Direktur Jenderal, InspekturJendral, dan Kepala Balitbang

Dikbud yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan dan strategi serta penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

Di tingkat propinsi instansi Depdiknas bertugas melaksanakan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi dari departemen yang bersangkutan, mengakomodasikan dan menjabarkan kebijakan yang telah digariskan oleh departemen bersangkutan dan memberikan pertimbangan kepada gubernur, khusus untuk bidang pendidikan dan kebudayaan instansi Diknas di propinsi bertindak sebagai regulator yang mempunyai peranan pokok untuk penjabaran kebijaksanaan dan strategi yang telah digariskan oleh pusat.

Di tingkat Kabupaten dan Kota, lembaga pengelolaan pendidikan terdiri atas seksi sarana pendidikan bertugas mengurus sarana dan prasarana pendidikan, sekretariat bertugas menangani perencanaan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan, sementara itu tenaga fungsional bertugas melakukan pemantauan, penilaian, pengendalian, bimbingan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar, taman kanak-kanak, pendidikan luar sekolah, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan.

b. Kepala Sekolah dan guru

Kepala sekolah bersama guru mendayagunakan semua fasilitas yang ada di sekolah guna mendayagunakan manajemen sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan

efisien di sekolah, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

3. Masyarakat, Orang Tua Siswa dan Peserta Didik

a. Kelompok Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat berhak untuk berperan serta dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, oleh sebab itu masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Orang Tua Siswa

Keterlibatan orang tua murid disini sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan anak di sekolah. Orang tua merupakan pihak yang menyediakan biaya pendidikan bagi siswa. Orang tua diberi kesempatan untuk bersama-sama pihak sekolah menganalisa seluruh infrastruktur yang ada di sekolah, apakah itu menyangkut SDM, kurikulum, sarana dan prasarana, finansial, sistem informasi, dan semua yang dianggap punya keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam hal ini orang tua dan masyarakat mempunyai hubungan konsultatif dimana posisi mereka tetap sebagai konsultan dan tidak boleh memberi komando yang sifatnya mutlak.

c. Peserta didik

Peserta didik yang dimaksud disini adalah siswa yang merupakan komponen mentah dalam artian siswa dengan segala karakteristik awalnya merupakan subjek yang akan dididik melalui berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga menjadi keluaran atau lulusan sebagaimana diharapkan.

Dari uraian tentang kedudukan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan diatas, maka *stakeholders* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah orang tua siswa.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh sebuah kebijakan pendidikan terhadap praktek penyelenggaraan pendidikan, yang dalam hal ini adalah pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

Penelitian tentang pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU tentang pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditahun 2006. Penelitian tersebut diberi judul “*Bantuan Operasional Sekolah dan Akses Terhadap Pendidikan Dasar Bagi Masyarakat Miskin*”, dan menggunakan metode kuantitatif. Sampel diambil di lima provinsi di Indonesia (Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan NTB). Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membebaskan biaya pendidikan menjadi gratis bagi siswa miskin

tidak terealisasi dengan baik karena kebanyakan sekolah menggunakan BOS untuk subsidi umum dengan hanya menggunakan dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah, serta tidak diikutsertakannya komite sekolah dan orang tua siswa dalam menyusun RAPBS (Hafiz, 2006).

Sementara itu penelitian lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan oleh Tim PKPS–BBM dalam bentuk evaluasi pelaksanaan program guna memonitor pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan penarikan sampel pada masing-masing kabupaten dan kota yang menerima alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini menghasilkan berbagai laporan tentang pelaksanaan program BOS yang dapat dijadikan rekomendasi dan penilaian kinerja di lapangan (Anonymous, 2007).

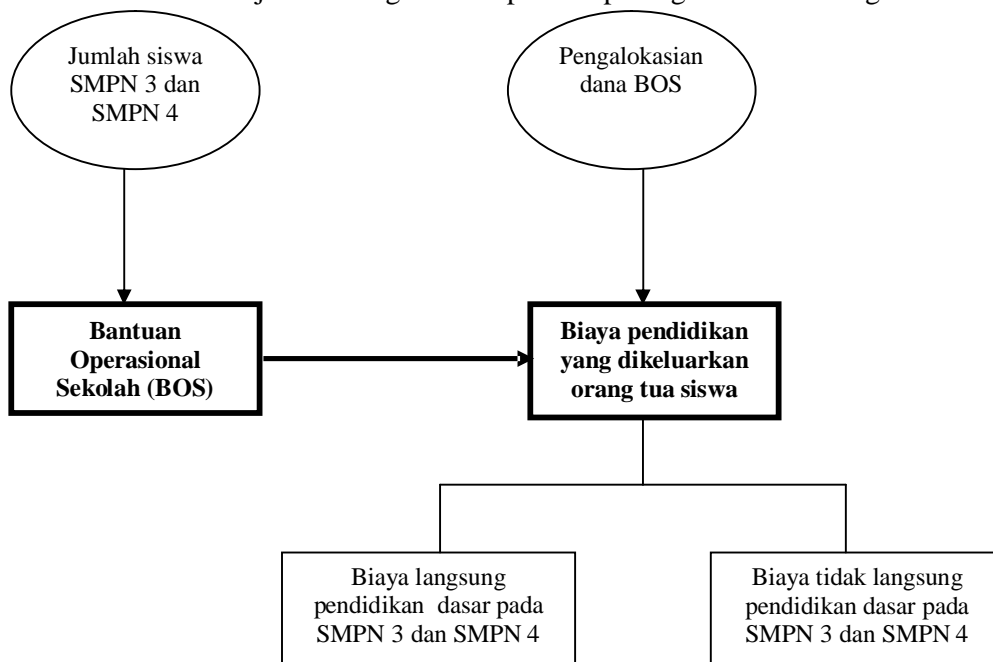
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan lembaga penelitian SMERU dan tim PKPS-BBM di atas, maka peneliti di sini tidak melihat secara keseluruhan pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari segi pengelolaan maupun pencapaian target program ini, tapi peneliti hanya melihat pengaruh yang ditimbulkan program ini terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

C. Kerangka Konseptual

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dengan kata lain program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini

bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Berdasarkan tujuan tersebut orang tua sebagai pihak penyedia biaya pendidikan merupakan pihak yang diuntungkan dengan adanya program BOS. Jadi dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa.

Secara lebih jelas kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka berfikir pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Besarnya dana BOS yang diberikan

untuk tiap sekolah tergantung dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Sekolah yang menerima dana BOS wajib mengalokasikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Bentuk pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa diduga negatif, maksudnya semakin efektif pelaksanaan program BOS maka cenderung semakin berkurang biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

Dengan demikian sesuai dengan kajian teori yang dikemukakan di atas, maka sebagai fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa pada SMPN 3 dan SMPN 4 di Kecamatan Batipuh Selatan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: terdapat pengaruh signifikan antara program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap penurunan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh dan sesuai dengan masalah serta tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa adalah positif. Berdasarkan olahan data ditemukan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4,608 > 2,3824$ dengan taraf signifikan $0,000 < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara program BOS dengan biaya yang dikeluarkan orang tua siswa. Sedangkan bentuk pengaruh program BOS terhadap penurunan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa adalah positif melalui nilai koefisien korelasi sebesar 0,488, artinya semakin meningkat program BOS maka semakin meningkat pula biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa. Sumbangan program BOS terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa adalah 23,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:

1. Diharapkan kepada orang tua siswa agar dapat mengalokasikan kelebihan dana akibat penurunan biaya pendidikan yang ditanggung setelah adanya program BOS pada bidang yang lebih bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan anak-anaknya.
2. Diharapkan kepada orang tua siswa agar dapat meningkatkan motivasi dalam menyekolahkan anak-anak dengan berkurangnya biaya pendidikan yang dikeluarkan setelah adanya program BOS sehingga program wajib belajar sembilan tahun dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2004). "Biaya Pendidikan Lebih Banyak Ditanggung Orang Tua Siswa". www.kompas.com.
- Anonymous. (2007). "Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007". www.bos.com.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). "Pelangi Pendidikan-Program PKPS-BBM tahun 2005". www.DepartemenPendidikanNasional.go.id.